

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DARI TRANSAKSI YANG DIDASARKAN KEPADA SKEMAPONZI

Oleh : SARI WULANDARI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan Kepada Skema Ponzi. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perusahaan publik dapat merekayasa produknya dengan menggunakan skema Ponzi di pasar modal ? dan Bagaimana Notaris dapat mengenali penerapan prinsip pengguna jasa untuk menghindari pembuatan akta autentik berdasarkan skema Ponzi ? Bahwa Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangatterat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Dalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau Pengguna Jasa, jejak rekam dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik.

Kata Kunci: Notaris, Skema Ponzi, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF RECOGNIZING SERVICE USERS FOR NOTARIES IN MAKING DEEDS OF TRANSACTIONS BASEDON A PONZI SCHEME

By : SARI WULANDARI

Abstract

This study aims to obtain information and analyze the law regarding the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries in Making Deeds of Transactions Based on Ponzi Schemes. By using the approach method in this study is a normative juridical approach. The formulation of the problem in this research is How can a public company engineer its product using a Ponzi scheme in the capital market? and How can a Notary recognize the application of the principle of service users to avoid making authentic deeds based on a Ponzi scheme? Whereas at this time there are only a few regulations which more or less pertain to the discussion of ponzi, including: Law No. 7 of 2014 concerning Trade, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law No. 19 of 2016 Jo. UU no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. Criminal provisions for investment activities with a ponzi/bulging scheme are regulated in Article 378 of the Criminal Code and are very closely related to crime and the scope of criminal responsibility. Notary as one of the reporting parties as referred to in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties, as referred to at least contains: identification of the Service User; Service User verification; and monitoring Service User Transactions. In the implementation of PMPJ, the availability of customer or Service User data, track records and various transactions carried out, as well as the administration or administration of good information documents.

Key Words: Notaries, Ponzi Schemes, Principles of Recognizing Service Users